

**PERJUANGAN LIBYA PASCA JATUHNYA REZIM MOAMMAR KHADAFI
TERHADAP PROSES DEMOKRASI**

Nuklia Pratiwi

Fitra Deni

Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11 Jakarta Selatan
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstract

Buildings like by political upheaval in the area of north africa and middle east in 2010 until the beginning of 2012 , known as arab spring .The revolution of the people in libya beginning with the encouragement of democracy because rhetoric contains khadafi in the era , not government run in accordance with the aspirations of the people .Khadafi rule libya for four decades with full of dictatorship .Until one when it was a demonstration that spread into the corners of libya khadafi demanding the withdrawal .After the end of the era of leadership khadafi , libya began to formulate a democracy , as we know that libya during khadafi in the era , azas-azas democracy was not done .Libyan national transition but the council has not been able to gain democracy that actually because many grouped under the safety of interest groups to libya , trying to power and control of government .Finally conflict between kepentinganpun happened .

Key Word: Democracy, Conflict, The Period Of Transition

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2010 hingga awal tahun 2012, di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi rakyat. Suatu revolusi yang bertujuan untuk merubah sistem pemerintahan dan bahkan menumbangkan penguasa.¹⁸ Arab Spring telah membawa perubahan mendasar dalam dinamika partisipasi politik di dunia Arab. Dimulai dari serangkaian demonstrasi yang menyebabkan jatuhnya Presiden Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia, kemudian Mesir dengan turunnya Presiden Hosni Mubarak.¹⁹ Perang sipil di Libya diawali dengan retorika berisi dorongan demokratisasi karena tidak adanya realisasi dalam menerapkan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Di era Moammar Khadafi, Libya menetapkan sistem pemerintahan "*Jamahiriyah*" atau negara rakyat, yang dalam pemikirannya merupakan tipe pemerintahan oleh rakyat melalui Dewan Lokal, tetapi pada prakteknya pemerintahan dijalankan secara otoriter.²⁰ Moammar Khadafi menjalankan pemerintahan di Libya tanpa adanya partai politik, maupun kelompok kepentingan "*The Arab Spring*" yang menunjuk pada revolusi sosial yang terjadi di kawasan jazirah Arab dan Afrika Utara, termasuk Libya.

II. PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Khadafi dan

¹⁸. Apriadi Tamburaka, "Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah", Narasi:Yogyakarta: 2011, hlm 7.

¹⁹. Adirini Pujayanti, "Pasca Demokratisasi Timur Tengah, Jurnal Hubungan Internasional", Vol III No. 19, Oktober 2011, hlm 5

Upaya-Upaya Penyelamatan Ke- kuasaannya di Libya

Moammar Khadafi mendapatkan kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah pada tanggal 1 September 1969 dari pemerintahan Raja Idris. Dalam kudeta tersebut, Khadafi memimpin kelompok perwira militer. Raja Idris adalah seorang bangsawan dari wilayah Cyrenaica di sebelah timur Libya. Hal yang menyebabkan Khadafi melakukan kudeta terhadap Raja Idris adalah cara pemerintahan Raja Idris yang dianggap memihak pada imperialisme Barat dan memerintah dengan sistem monarki absolut.²¹ Setelah berhasil menguasai Libya, Khadafi mengambil alih pemerintahan. Dengan panduan ideologi yang tercantum dalam "Buku Hijau", Khadafi berusaha membangun negaranya agar pondasi kekuasaannya kuat. Dikarenakan sifat pemerintahan yang otoriter, membuat gaya kepemimpinannya tidak disukai oleh rakyatnya. Khadafi tidak segan-segan mengambil tindakan ekstrim bagi siapa saja yang berusaha melawan kepemimpinannya. Kepemimpinan diktatornya membuat Khadafi berbenturan dengan berbagai pihak, kaum nasionalis, kelompok kesukuan dan kelompok Islam.

Moammar Khadafi mulai goyang dalam panggung politik Libya ketika pada tahun 2011, dunia internasional diwarnai dengan munculnya gejolak demokrasi perlawanan rakyat di

²⁰. Jamal Bakarsyum, "Perbandingan Kebijakan Perancis Jerman Terkait Perang Sipil Libya 2011", Jurnal Hubungan Internasional, Volume IX No. 1 Tahun 2012, hlm . 88.

²¹. David E. Long & Bernard Reich Ed. "the Government and Politics of the Middle East and North Africa", Westview Press: Boulder (Colorado), 2002, hlm 380.

Timur Tengah.²² Untuk menyelamatkan kekuasaannya Khadafi mengambil tindakan represif dan aksi anarkis terhadap rakyat yang menentang pemerintahannya sehingga mengakibatkan demonstrasi berubah menjadi perlawanan bersenjata dan Khadafi berusaha menindas rakyat yang menyebabkan Semakin banyaknya aksi penolakan dan perlawanan.

Aksi anarkis Khadafi, mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak cepat untuk membantu menghentikan pertumpahan darah di negara Afrika Utara itu dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973, yang memberikan wewenang kepada negara – negara PBB. untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi warga sipil, termasuk larangan semua pe nerbangan di atas wilayah Libya.²³ Melalui NATO resolusi diterapkan dengan melakukan intervensi dan perlawanan bersenjata dengan rezim Khadafi sampai pada akhirnya kepemimpinan Khadafi berakhir dan Khadafi tewas pada pertempuran melawan NATO dan Rakyat Libya. Pasca kepemimpinan Khadafi, tiba saatnya rakyat dengan membentuk pemerintah sementara Libya, mengambil peranan untuk mengubah Libya sesuai dengan cita-cita revolusi, yaitu mewujudkan negara demokrasi yang selalu menyuarakan aspirasi rakyat, serta menata negara menuju kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat.

B. Peran Dewan Transisi Nasional (NTC) melaksanakan Proses Demokrasi di Libya Pasca Rezim Khadafi

Setelah kepemimpinan Khadafi berakhir tanggal 20 Oktober 2011,

Kekuasaan diambil alih oleh Dewan Transisi Nasional (NTC). Dewan yang dibentuk tanggal 27 Februari 2011 ini, yang secara de facto adalah sebuah parlemen Libya yang didirikan oleh golongan anti Khadafi selama perang berlangsung untuk melawan pemerintahan Khadafi, mendeklarasikan bahwa Libya sudah terbebas dari belenggu kediktatoran.²⁴ Kehadiran NTC merupakan suatu bentuk wajah revolusi rakyat Libya, yaitu pihak dewan berkomitmen untuk membawa Libya kearah pemerintahan yang lebih baik, berdemokrasi, menghormati supremasi hukum, keadilan sosial tanpa adanya diskriminasi, menghormati hak asai manusia, dan membebaskan partisipasi rakyat Libya dalam politik, ekonomi yang bebas dari korupsi, serta mencegah adanya pemberdayaan terhadap perempuan, sistem inilah yang telah selama ini di impikan dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Libya.

PBB melalui Dewan Keamanan, sebagai pihak ketiga yang masuk ke dalam konflik Libya, membentuk suatu organisasi yang ditugaskan membantu pemulihan keadaan di Libya pasca revolusi yang diberi nama United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL). UNSMIL yang dibentuk pada 16 September 2011 dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2009 (2011) atas permintaan NTC, yang ditujukan untuk memulihkan keadaan di Libya pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafi. Dengan dukungan teknis PBB, pemilu diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2014. Pemilu tersebut akan

²² . The World Factbook, CIA.Tentang Populasi Libya, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2011

²³ . AS: "Tak Ada Kesepakatan Intervensi Libya". <http://www.antarane.ws.com/intervensi-libya>, diakses tanggal 11 Juni 2011.

²⁴ . The Proposed Aim of The Transitional Council, www.ntclibya.org/English, diakses 5 Maret 2011.

memilih 200 Dewan anggota Parlemen yang akan menghasilkan Kongres Nasional Umum dengan jumlah rakyat yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 1,5 juta orang.⁵⁵

Tetapi pada kenyataannya, politisi dari partai yang kalah suara tidak bisa menerima kekalahan pada pemilu yang digelar tanggal 25 Juni 2014. Hal itu mengakibatkan partai minoritas yang kalah suara tersebut, yang didominasi oleh Partai Libya Ikhwanul Muslimin, Partai Keadilan dan Pembangunan, memproklamirkan diri sendiri sebagai pemerintah tandingan melawan pemerintah resmi dari kelompok aliansi Nasional yang menang dalam pemilihan.¹¹ Akibat dari egoisme para pemimpin yang berebut kekuasaan, rakyat Libya merasakan dampak dari perselisihan tersebut. Pemulihan keadaan untuk menyusun sistem pemerintahan baru yang stabil dan demokratis sepertinya memerlukan waktu yang sangat panjang. Ini artinya Libya pasca jatuhnya rezim Khadafi masih juga menghadapi kendala berat dalam tahap awal untuk menciptakan stabilitas dan keamananan.

C. Tantangan-tantangan yang dihadapi Libya dalam Proses menuju Negara Demokrasi

Libya selama ini tidak mengenal demokrasi yang berlandaskan pada adanya partai sebagai saluran aspirasi rakyat. Persoalan penting lainnya adalah minimnya pengalaman dalam menentukan sistem pemilihan anggota dewan legislatif, membangun komisi pemilihan umum yang independen dan berintegritas dan memastikan terbitnya konstitusi yang menjamin kesetaraan dan kebangsaan. Hal ini berkaitan bahwa Libya belum pernah mengadakan pemilu dan pada masa kekuasaan Khadafi, tidak mem-

bolehkan ada penguasa lain selain Khadafi. Kebebasan berpolitik dan menyuarakan pendapat ditiadakan total sehingga masyarakat tidak bisa atau kurang memahami tokoh-tokoh yang ada sekarang ini karena nama-nama dan visi mereka tidak familiar di ingatan masyarakat. Akibatnya saat terjadi revolusi dan gelombang demokratisasi besar-besaran belum banyak orang-orang yang siap untuk menjadi pengganti Khadafi.

Tantangan lainnya adalah adanya perpecahan diantara golongan, baik yang bersifat sektarian dan kewilayahan untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan guna menghindari konflik antar suku dan agama, terutama diantara suku-suku yang selama ini mendukung Khadafi. Libya dengan banyak suku masih belum sepenuhnya terlepas dari sistem tradisional yang mengatur posisi sosial individu berdasarkan keturunan. Sistem kesukuan di Libya masih sangat kuat, juga perselisihan antara kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini tidak terpikirkan di era Khadafi. Libya membutuhkan kepemimpinan yang solid mengingat NTC selama ini juga belum berpengalaman mengelola suku-suku di Libya yang pada masa sebelum Khadafi sering berkonflik satu sama lain. Perpecahan dan perebutan kekuasaan ini masih di negara-negara yang baru memasuki demokrasi karena pemikiran bahwa setiap suku, setiap kawasan, mempunyai andil dalam pembentukan pemerintahan baru.

⁵⁵ <http://mirajnews.com/id/internasional/ketegangan-politik-dan-keamanan-ancam-libya>, diakses 10 Juni 2014.

²⁶ Abu Sahmain, Ghariani condemned by Thinni and parliament leader Saleh". Libya Herald, 25 August 2014.

Perpecahan pada dua aliansi kepemimpinan dengan berbagai multi etnik partai untuk memperebutkan siapa yang pantas mempunyai kewenangan dan berkuasa mengendalikan negara, menimbulkan kerusuhan dan konflik bersenjata antara kelompok yang bertikai. Akibatnya Libya sampai saat ini sedang menghadapi perang saudara yang berkepanjangan. Perang tersebut jelas telah melemahkan cita-cita demokrasi yang sudah lama menjadi mimpi rakyat Libya. Pemerintah Libya sendiri saat ini dianggap masih lemah untuk dapat menjaga ketertiban di wilayah Libya. Aparat kepolisian masih kekurangan personil dan sumber daya, sedangkan militer Libya bahkan belum terbentuk sama sekali.

Demokrasi bukanlah hal yang mudah, demokrasi membutuhkan proses yang sangat panjang menuju kesana. Bahkan negara-negara selain Libya yang lebih awal mengalami demokrasisasi seperti Mesir, yang setelah tiga tahun revolusi beberapa hal yang belum berubah, yaitu pertama, militer tetap berkuasa sama seperti sebelum revolusi. Kedua, Partai Islam tetap dilarang untuk aktif dalam politik. Di Suriah, sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang ini masih banyak diwarnai konflik etnis dalam upaya mewujudkan demokrasi.²⁷

D. Analisa Gagalnya Proses Demokrasi Pasca Khadafi Menuju Pemerintahan Yang Lebih Baik

Demokratisasi yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara memasuki babak baru yang sangat kompleks. Krisis Libya tak tampak akan selesai dalam waktu dekat. Justru konflik politik domestik meluas menjadi sorotan internasional. Timur Tengah memang unik dalam hal de-

mokratisasi. Timur tengah unik karena ini warisan lama dari proses terbentuknya negara itu. Sejarah pembentukan negara di Timur Tengah sangat cepat, di mana pembentukan konstitusi dan debat ideologi tidak berjalan baik. Sehingga negara yang terbentuk adalah negara yang masih kental budaya kesukuan atau tribalisme. Dari Kejadian revolusi “Arab Spring”, demonstrasi di Libya yang menekan kekuasaan Khadafi, telah mengakibatkan jatuhnya kepemimpinan Khadafi. Meskipun telah banyak cara yang dilakukan oleh Khadafi agar demonstrasi itu tidak berakibat buruk terhadap kekuasaan dan kepemimpinannya. Namun campur tangan dunia internasional melalui intervensi PBB, akhirnya kepemimpinan Khadafi berakhir dan Libya memasuki babak baru menuju sebuah negara di alam demokrasi. Kedua, ternyata demokrasi tersebut tidak bisa berjalan setelah berakhirnya Rezim Khadafi, meskipun telah dibentuk dewan transisi untuk mewujudkan arah pembentukan negara demokrasi. Banyak kelompok kepentingan yang merasa ada andil dalam merebut Libya dari Khadafi, menginginkan kekuasaan di Libya. Sudah tak terhingga ledakan bom dan sabotase yang mengacaukan stabilitas keamanan. Entah sudah berapa ribu jiwa menjadi korban pertikaian. Rakyat Libya menyaksikan proses transisi menuju demokrasi ini dengan cemas. Alasannya agak klasik. Belajar dari negara-negara yang bergerak dari rezim otoriter menuju demokrasi, lebih banyak berjalan tidak mulus.

Libya sendiri sudah empat dekade berada dalam rezim otoriter. Mereka belum punya pengalaman bagaimana berbagi kekuasaan di

²⁷. Humprey Wangke , “Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah”, Jurnal Hubungan Internasional, DPR RI: volume VI No. 03, Februari 2014, hlm 6.

bawah bendera demokrasi. Yang mereka tahu, perbedaan diselesaikan dengan sepucuk senapan, di ujung pedang atau di setumpuk bom. Pengalaman berdemokrasi mereka, nihil. Selama rezim Khadafi, praktis institusi demokrasi dihancurkan. Tidak ada partai politik, pers bebas, atau kelas menengah yang bergiat pada demokrasi. Bahkan kini, di institusi NTC, tergabung kelompok-kelompok yang sulit disatukan, apakah itu militer, intelektual, Arab, sekuler, dan lainnya.

Ada beberapa faktor sebab-sebab-sebab gagalnya proses demokrasi di Libya pasca Khadafi. Yaitu pertama, hilangnya kepercayaan Rakyat terhadap Dewan Transisi. Libya belum mendapat figur yang dinilai cukup kuat untuk menggantikan sosok Moammar Khadafi, yaitu figur pemimpin yang mampu membawa Libya pada kebijakan yang tepat dalam menyikapi "kepentingan" negara lain terhadap Libya, terutama negara yang andil dalam upaya revolusi Libya. Hal ini menyebabkan dilema ketidakpercayaan terhadap figur yang akan mengisi posisi kepemimpinan, ditambah Setiap daerah memiliki potensi keinginan untuk menjadi mayoritas dalam pemerintahan. Kedua, Lemahnya Kekuatan Pemerintah dan Tentara. Libya memiliki tentara nasional yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga memaksa mereka untuk mengandalkan para milisi lokal yang ada disana untuk mengamankan wilayah masing-masing. Namun para milisi lokal tersebut memiliki agenda masing-masing sehingga menyebabkan krisis loyalitas. Kelompok-kelompok pun saling bersaing dalam berbagai tingkatan. Dan ketiga, Pemerintah Menghadapi Kesulitan dalam Memulihkan Stabilitas keamanan. Konflik yang terjadi bukan lagi antara kaum revolusioner melawan Khadafi dan

sekutunya yang petanya jelas karena ada musuh bersama. Yang terjadi saat ini jauh lebih rumit karena terjadi antarsuku, antarmilisi, antarmazhab pemeluk agama, dan antarpendingung kepentingan politik. Seperti pada saat melawan Khadafi, dalam konflik antar mereka pun, tetap diwarnai kekerasan dengan menggunakan senjata otomatis dan bom sehingga banyak memakan korban jiwa. Hidup bagi banyak warga sipil Libya memburuk. Kondisi warga Libya, semakin berada dalam tekanan ketakutan dan Kekerasan. Situasi ini membuat rakyat Libya kuatir, periode transisi ini menuju negara gagal, bukan negara demokratis.

III. KESIMPULAN

Selama Kadafi memimpin Libya lebih kurang 42 tahun, rakyat di negara ini sama sekali tidak memiliki pengalaman dan kultur dalam berdemokrasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Libya hanya berlandaskan pada ideologi filosofi Muammar Khadafi yang ditulis dalam "Buku Hijau". Ideologi tersebut menerangkan tentang demokrasi yang sudah berjalan di berbagai negara adalah bukan demokrasi yang sesungguhnya karena hanya mencerminkan suara terbanyak. Sehingga, Khadafi tidak menerapkan adanya Pemilu, tidak ada konstitusi, apalagi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kritis. Aliran-aliran politik yang tumbuh di Libya memiliki perbedaan yang relatif signifikan. Ada perbedaan yang keras antar aliran-aliran politik, terutama disebabkan karena modal sosial dari masing-masing aliran, di samping perbedaan ideologi politik, juga ada perbedaan suku yang kerap saling bertikai. Upaya-upaya penyelamatan Kekuasaan diantaranya NTC yang dibentuk ternyata tidak berhasil menjalankan proses demokrasi karena terganjal oleh kon-

flik dua kelompok dari kubu Nasionalis dan Islamis yang memperebutkan kekuasaan, serta masih banyaknya loyalis Khadafi yang menyusup di semua kekuatan politik yang sewaktu-waktu bisa menggalang kekuatan jika tidak mampu dikendalikan, bukan tidak mungkin akan merenggut kembali kebebasan politik dengan merebut tampuk pemerintahan yang dihasilkan Pemilu.

Selain itu gagalnya Demokrasi di Libya Pasca Khadafi adalah belum berhasilnya gagasan-gagasan yang diajukan PBB untuk membuka dialog politik, antara kelompok politik yang bertikai, sehingga sampai sekarang Libya masih dikendalikan oleh dua kepemimpinan dan dua parlemen yang saling bersaing. Berbagai upaya telah dilakukan PBB dari mulai pertemuan di Jenewa, Swiss untuk berusaha membuka sebuah "dialog paralel" antara partai-partai politik dan aktivis Libya. Pertemuan tersebut gagal dilakukan karena Kongres Nasional Libya, dari anggota parlemen kelompok Islamis, memboikot pertemuan Jenewa dan menuntut agar pertemuan itu diselenggarakan di Libya. Situasi ini membuat rakyat Libya khawatir, periode transisi ini menuju negara gagal, bukan negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Apriadi Tamburaka "Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah", Narasi: Yogyakarta: 2011.

Adirini Pujayanti, "Pasca Demokratisasi Timur Tengah, *Jurnal Hubungan Internasional*", Vol III No. 19, Oktober 2011.

Jamal Bakarsyum, "Perbandingan Kebijakan Perancis Jerman Terkait Perang Sipil Libya 2011", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume IX

No. 1 Tahun 2012.

The World Factbook-CIA, Tentang Sistem Pemerintahan Libya melalui, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html>, diakses tanggal 18 Desember 2011.

David E. Long & Bernard Reich Ed. "the Government and Politics of the Middle East and North Africa", Westview Press: Boulder (Colorado), 2002.

The World Factbook, CIA. Tentang populasi Libya, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2011.

AS: "Tak Ada Kesepakatan Intervensi Libya". [Http://www.antaranews.com/intervensi-libya](http://www.antaranews.com/intervensi-libya), diakses tanggal 11 Juni 2011.

The Proposed Aim of The Transitional Council, www.ntclibya.org/English, diakses 5 Maret 2011.

<http://unsmil.unmissions.org>, "Resolution 2009: Adopted by the Security Council at its 662th Meeting, on 16 September 2011", 16 September 2011.

<http://mirajnews.com/id/internasional/ketegangan-politik-dan-keamanan-ancam-libya>, diakses 10 Juni 2014.

Abu Sahmain, Ghariani condemned by Thinni and parliament leader Saleh". *Libya Herald*, 25 August 2014.